

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai salah satu landasan konseptual yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun dan mengembangkan penelitian ini. Melalui kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, peneliti memperoleh wawasan yang mendalam untuk mengembangkan kerangka teoritis dan metodologis yang relevan dengan topik yang diangkat. Fokus utama dari penelitian ini adalah kesejahteraan sosial masyarakat pasca relokasi akibat pembangunan bendungan. Meskipun tidak terdapat kesamaan secara langsung antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, beberapa studi sebelumnya tetap dijadikan sebagai referensi karena memiliki keterkaitan dalam konteks, tema, maupun pendekatan.

Adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini menjadi pijakan penting dalam menyusun kerangka berpikir yang lebih komprehensif dan mendalam. Oleh karena itu, berikut disajikan rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan kajian dan analisis pada penelitian ini:

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Aulia Istioah Zahriani, S.Pd, Dr. Desy Safitri, M.Si, Martini, SH, MH pada tahun 2019 dengan judul “Kesejahteraan Keluarga pada Masyarakat Pasca Relokasi Permukiman” adapun hasil penelitiannya yaitu Salah satu penelitian terdahulu mengkaji kondisi kesejahteraan

keluarga pada masyarakat eks-Pasar Ikan setelah direlokasi ke lingkungan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek ekonomi, kesejahteraan keluarga mengalami penurunan signifikan akibat hilangnya mata pencaharian yang sebelumnya diperoleh saat masih menetap di kawasan Pasar Ikan. Dalam aspek sosial, terdapat penurunan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup tertib serta pengembangan keterampilan individu. Namun demikian, relasi sosial antaranggota keluarga dan antartetangga justru menunjukkan peningkatan, yang ditandai dengan makin eratnya interaksi sosial karena latar belakang pengalaman relokasi yang serupa. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan keluarga masyarakat eks-Pasar Ikan belum dapat dikategorikan sejahtera secara menyeluruh, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Penelitian ini membahas mengenai Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Kesejahteraan Sosial pasca Relokasi. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian penelitian ini berfokus pada kesejahteraan keluarga sedangkan fokus peneliti berfokus pada kesejahteraan sosial masyarakat.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Subhan Yasir pada tahun 2021 dengan judul “Dampak Pembangunan Hartono Mall Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Soropadan Condongcatur Depok Skeman Yogyakarta” adapun hasil penelitiannya yaitu Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Hartono Mall memberikan sejumlah dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satu dampak yang

paling signifikan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Kehadiran pusat perbelanjaan ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan munculnya berbagai usaha baru di sekitar area Hartono Mall, seperti warung makan, toko retail, jasa parkir, dan usaha kecil menengah lainnya. Kondisi ini memberikan peluang ekonomi yang menguntungkan bagi para pelaku usaha lokal. Selain itu, nilai jual tanah di kawasan sekitar mall mengalami kenaikan yang cukup signifikan, menunjukkan bahwa keberadaan Hartono Mall juga mendorong peningkatan nilai aset masyarakat. Namun demikian, selain dampak positif, keberadaan Hartono Mall juga membawa sejumlah dampak negatif, terutama dalam aspek sosial dan lingkungan. Salah satu dampak negatif yang dirasakan adalah meningkatnya kepadatan penduduk di sekitar lingkungan Hartono Mall.

Persamaan dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembangunan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Raveno Hikmah Nur Rohman pada tahun 2019 dengan judul “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Di Pasar Kuna Lereng Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas” adapun hasil penelitiannya yaitu Pasar Kuna Lereng menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Pasar ini menerapkan konsep tradisional, mulai dari pakaian, bahasa, hiburan, hingga alat transaksi yang menggunakan uang kepeng dari batok kelapa. Kebersihan juga dijaga dengan melarang penggunaan plastik. Proses peningkatan

kesejahteraan dilakukan melalui dua jalur: Internal, yaitu kreativitas pedagang dalam menyajikan makanan tradisional yang menarik, kemasan alami, dan pelestarian budaya lokal. Eksternal, yaitu peran pengelola pasar dalam membenahi fasilitas, promosi melalui media sosial, perluasan area, serta evaluasi rutin. Seluruh masyarakat, tanpa memandang tingkat kesejahterannya, diberi kesempatan berdagang sebagai upaya menciptakan kemandirian ekonomi. Selain meningkatkan pendapatan dan daya beli, pasar ini juga membuka lapangan kerja, memperkuat solidaritas sosial, melestarikan budaya, dan menjaga lingkungan.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada fokus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian masing-masing penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan sosial berbasis kearifan lokal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada kesejahteraan sosial masyarakat pasca relokasi.

4. Penelitian keempat disusun oleh Baihaqqi pada tahun 2021 dengan judul “Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Prospektif Ekonomi Islam” hasil penelitiannya yaitu Program pembangunan kampung di Kampung Terangun dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur dan pelatihan ekonomi. Strategi pengentasan kemiskinan mencakup peningkatan akses jalan, pelayanan kesehatan, pembentukan kelompok tani, dan pendirian BUMKam. Dalam perspektif ekonomi

Islam, pembangunan tersebut memberikan kemaslahatan secara ekonomi dan sosial, karena didasari oleh nilai-nilai ibadah dalam setiap aktivitas ekonomi.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada tema pembangunan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaan terdapat pada fokus pembangunan yang dikaji. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pembangunan kampung, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembangunan bendungan.

5. Penelitian kelima yang dilakukan oleh T Jamalul Akmal pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Pengaruh Pembangunan infrastruktur Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh” hasil penelitiannya yaitu Penelitian ini membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan ekonomi jangka panjang suatu negara. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kinerja dan perkembangan perekonomian suatu wilayah atau negara dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengukur sejauh mana pengaruh variabel infrastruktur, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis dilakukan dengan menggunakan data runtut waktu (time series) dari tahun 1990 hingga tahun 2020.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh pembangunan terhadap masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada

lokasi penelitian, lokasi penelitian ini terletak di Aceh sedangkan lokasi yang dilakukan peneliti terletak di Desa Rejoso Kab Nganjuk.

B. Kajian Konsep

1. Konsep Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Oman Sukmana (2022), kesejahteraan sosial merupakan konsep yang sangat luas dan berkaitan dengan kondisi umum yang lebih baik (*general wellbeing*) bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat dua dimensi utama dari konsep kesejahteraan sosial, yaitu:

Apa yang bisa diperoleh oleh masyarakat, mencakup program-program, manfaat, dan layanan yang tersedia; Bagaimana kebutuhan masyarakat, baik sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan, dapat terpenuhi secara layak dan memadai. Reid (dalam Kirst-Ashman, 2010) menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai sebuah gagasan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih layak. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja yang bermakna, jaminan keamanan dan perlindungan, promosi keadilan, serta terciptanya stabilitas ekonomi yang produktif bagi individu. Kesejahteraan sosial dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu:

1. Sebagai institusi (institutional): Menurut *The National Association of Social Workers* (NASW), kesejahteraan sosial adalah sistem nasional yang terdiri dari

program, manfaat, dan layanan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, yang merupakan hal fundamental dalam menjaga keberlangsungan masyarakat.

2. Sebagai disiplin akademik (*academic discipline*): Kesejahteraan sosial dipelajari sebagai suatu bidang ilmu yang berfokus pada kajian kebijakan, praktik, dan teori dalam mendukung kehidupan masyarakat.

Dalam pandangan Pierson (2007), konsep *welfare* (kesejahteraan) setidaknya memiliki tiga subkategori, yaitu:

1. Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare*): Berkaitan dengan penerimaan manfaat kesejahteraan secara kolektif oleh masyarakat.
2. Kesejahteraan Ekonomi (*Economic Welfare*): Terkait dengan penyediaan jaminan sosial melalui aktivitas ekonomi formal.
3. Kesejahteraan Negara (*State Welfare*): Berkaitan dengan peran institusi dan agen negara dalam menyediakan layanan kesejahteraan sosial.

Tujuan utama dari kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan seringkali disalahartikan hanya sebagai kondisi kepemilikan harta atau pendapatan yang tinggi, padahal sejatinya mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa: "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya."

Fahrudin (2014) Kesejahteraan sosial dipahami sebagai suatu kondisi di mana individu mampu memenuhi kebutuhan hidup secara menyeluruh serta menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu bentuk kegiatan yang terorganisir, yang bertujuan untuk membantu individu maupun kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sekaligus mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan pribadi, keluarga, dan komunitas. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep kesejahteraan sosial tidak dapat dipandang secara sempit atau terbatas. Kesejahteraan meliputi berbagai dimensi kehidupan, dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah dalam menyusun serta mengimplementasikan kebijakan publik yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.

b. Tujuan Kesejahteraan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi kesejahteraan sosial, konsep ini juga mengandung tujuan yang ingin dicapai. Menurut Fahrudin (2012:10), tujuan dari kesejahteraan sosial meliputi hal-hal berikut:

1. Mewujudkan kehidupan yang sejahtera, yang berarti individu mampu memenuhi standar kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, serta memiliki hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya.
2. Mendorong tercapainya kemampuan penyesuaian diri yang baik, khususnya dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Hal ini mencakup kemampuan untuk menggali potensi sumber daya yang ada, meningkatkan kapasitas diri, serta mengembangkan kualitas hidup secara mandiri.

c. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi beban yang ditimbulkan oleh perubahan sosial dan ekonomi, mencegah timbulnya dampak sosial negatif akibat pembangunan, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Friedlander dan Apte (1982), fungsi kesejahteraan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:

- a) Fungsi Pencegahan, Fungsi ini berfokus pada pemberian dukungan sosial yang ditujukan untuk membantu individu, keluarga, dan komunitas agar terhindar dari munculnya permasalahan sosial baru. Dalam konteks perubahan sosial yang berlangsung cepat, pencegahan diarahkan pada berbagai kegiatan yang dapat membentuk pola baru hubungan sosial serta mendukung terbentuknya lembaga sosial yang adaptif.

- b) Fungsi Pengembangan, Fungsi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap proses pembangunan sosial. Hal ini mencakup pengembangan sistem sosial dan pemanfaatan sumber daya sosial guna mendorong kemajuan masyarakat.
- c) Fungsi Penunjang, Fungsi ini mencakup berbagai aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan di sektor lain yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, fungsi penunjang memperkuat efektivitas layanan sosial yang terintegrasi dengan bidang pembangunan lainnya.

3. Konsep Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Berbagai ahli telah memberikan definisi mengenai konsep masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah *society* berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti “kawan” atau “teman.” Sementara itu, dalam bahasa Arab, istilah “masyarakat” berasal dari kata *syaraka*, yang berarti “ikut serta” atau “berpartisipasi.” Secara umum, masyarakat dipahami sebagai sekelompok manusia yang saling berinteraksi satu sama lain.

Koentjaraningrat (2009:116) menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang saling bergaul atau menjalin interaksi sosial. Phil Astrid S. Susanto (1999:6) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan satuan sosial yang

menunjukkan pola keteraturan yang berlangsung secara berulang. Sedangkan menurut Dannerius Sinaga (1988:143), masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu, saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan memiliki solidaritas yang terbentuk karena latar belakang sejarah, budaya, maupun politik yang sama.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri atas individu-individu yang menjalin hubungan sosial, memiliki kesamaan dalam sikap, tradisi, perasaan, dan budaya, serta membentuk pola kehidupan yang teratur dalam suatu sistem sosial yang terpadu.

Macam-macam Masyarakat:

a) Masyarakat Desa

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa merupakan suatu kesatuan hukum yang dihuni oleh sekelompok masyarakat dan memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Pendapat ini menekankan bahwa desa tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki otonomi dalam mengatur kehidupan warganya.

Sementara itu, Bintaro memandang desa sebagai bentuk integrasi dari berbagai unsur, yaitu unsur geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, yang saling berkaitan dan berinteraksi, baik di dalam desa itu sendiri maupun dengan wilayah lain di sekitarnya. Paul H. Landis memberikan definisi desa sebagai suatu wilayah yang

dihuni oleh populasi yang relatif kecil, yaitu kurang dari 2.500 jiwa. Menurutny, desa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kawasan perkotaan. Adapun ciri-ciri desa menurut Landis adalah sebagai berikut:

1. Hubungan sosial yang erat dan saling mengenal antar warganya.
2. Adanya ikatan perasaan dan kebiasaan yang sama.
3. Kegiatan ekonomi didominasi oleh sektor agraris, seperti pertanian dan peternakan, yang sangat bergantung pada kondisi alam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas, dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan hak asal-usul serta nilai-nilai adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa. Beberapa ciri khas masyarakat desa antara lain:

1. Pekerjaan umumnya bersifat homogen dan bergantung pada alam.
2. Ikatan kekeluargaan dan komunikasi antar warga sangat kuat.
3. Solidaritas sosial tinggi karena kesamaan budaya dan tujuan hidup.
4. Kepadatan penduduk rendah dengan jarak rumah yang berjauhan.
5. Mobilitas masyarakat cenderung rendah.

b) Masyarakat Kota

Secara universal, kota dipahami sebagai wilayah berkarakter urban yang memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan desa, baik dari segi kepadatan penduduk, fungsi wilayah, maupun status administratifnya. Secara etimologis, istilah “kota” memiliki makna yang berkaitan dengan batas wilayah tertentu. Dalam bahasa Cina, istilah kota diartikan sebagai “dinding”, sedangkan dalam bahasa Belanda kuno, kata *tuiin* berarti “pagar”. Kedua istilah tersebut mengandung pengertian tentang adanya pembatas fisik yang menandai suatu kawasan.

Masyarakat kota, yang sering disebut sebagai *urban community*, merupakan kelompok sosial yang hidup dalam lingkungan dengan ciri-ciri khas kehidupan perkotaan, seperti tingkat heterogenitas yang tinggi, sistem kerja yang kompleks, dan mobilitas sosial yang lebih dinamis. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kehidupan keagamaan cenderung lebih berkurang dibanding desa.
2. Individu lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada orang lain.
3. Pembagian kerja lebih spesifik dan jelas.
4. Kesempatan kerja lebih beragam, dari yang sederhana hingga berbasis teknologi.
5. Interaksi sosial lebih bersifat rasional dan didasarkan pada kepentingan.

6. Pola hidup cepat dan efisien, dengan penekanan pada manajemen waktu.
(Muhammad, 2017)

4. Konsep Relokasi

a. Pengertian Relokasi

Relokasi merupakan pemindahan lokasi, baik itu industri maupun pemukiman, dari satu tempat ke tempat lain. Secara umum, relokasi dapat dimaknai sebagai pemindahan lokasi industri dari negara maju ke negara berkembang, atau antarnegara. Relokasi umumnya dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan lokasi kegiatan industri ke sumber bahan baku, serta untuk memproduksi barang yang memiliki daya saing di pasar internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982:739), relokasi didefinisikan sebagai proses pemindahan lokasi suatu rencana industri ke wilayah tertentu yang dirancang untuk segera direalisasikan. Definisi ini menekankan bahwa relokasi tidak hanya mencakup aspek pemindahan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perencanaan strategis dalam pengembangan wilayah industri.

Relokasi juga dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Revitalisasi sendiri merupakan suatu proses pembangunan kembali atas kondisi atau wilayah yang sebelumnya kurang berdaya. Dalam konteks kebijakan pemerintah, relokasi sering kali ditujukan untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat di daerah terdampak dengan membangun kembali kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru.

Menurut De Wet (dalam Bower dan Weerasinghe, 2021), relokasi bertujuan untuk menjamin bahwa kondisi masyarakat setelah dipindahkan menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelum relokasi. Kondisi tersebut mencakup aspek-aspek seperti peningkatan pendapatan, keberagaman sumber mata pencaharian, stabilitas status sosial serta jaminan kehidupan di lokasi permukiman yang baru, dan kemudahan akses terhadap layanan infrastruktur dasar, meliputi penyediaan air bersih, fasilitas sanitasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Relokasi sering kali dilatarbelakangi oleh berbagai risiko bahaya, seperti bencana banjir, tanah longsor, atau kebakaran. Meski demikian, dalam banyak kasus, keputusan untuk melakukan relokasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-lingkungan seperti pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan demografi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa relokasi yang dilaksanakan atas inisiatif pemerintah tidak hanya dilandasi oleh narasi adaptasi terhadap perubahan iklim, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia serta keberlanjutan sosial masyarakat terdampak (Bower dan Weerasinghe, 2021).

b) Latar Belakang Terjadinya Relokasi Pemukiman

Asian Development Bank (1995) mengemukakan bahwa terdapat beberapa kebijakan dan peristiwa yang sering menjadi penyebab dilakukannya program relokasi (*resettlement*), antara lain:

1. Proyek-proyek pembangunan pemerintah yang membutuhkan pembebasan lahan, seperti pembangunan infrastruktur kota, waduk, jalan bebas hambatan, rel kereta api, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
2. Keadaan force majeure, seperti bencana alam, kebakaran besar, konflik bersenjata, atau kerusuhan sosial.

Selain itu, Jha dkk. (2010) menjelaskan beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan relokasi, yaitu:

1. Perencanaan relokasi yang efektif harus mampu mendukung proses pembangunan kembali kehidupan masyarakat dan mendorong pandangan positif terhadap masa depan.
2. Relokasi tidak selalu merupakan satu-satunya pilihan; pengurangan risiko dapat dilakukan tanpa harus memindahkan seluruh masyarakat, misalnya melalui pengurangan kepadatan penduduk.

3. Relokasi bukan hanya pemindahan tempat tinggal, melainkan juga upaya untuk membangun kembali jaringan sosial dan modal sosial masyarakat yang terdampak.
4. Pelaksanaan relokasi sebaiknya berbasis pada pemberian insentif, bukan paksaan, agar masyarakat terdorong secara sukarela untuk pindah.
5. Lokasi relokasi sebaiknya berada sedekat mungkin dengan tempat asal masyarakat terdampak guna meminimalisasi perubahan sosial dan budaya.
6. Masyarakat yang berada di wilayah tujuan relokasi juga merupakan bagian dari pihak terdampak, sehingga perlu dilibatkan dalam proses perencanaan secara partisipatif.

